

Pola adaptasi masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Miring, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat

Andi Ridha Yayank Wijayanti^{1*}, Andi Arafat¹, Irlan¹

¹Program Studi Kehutanan, Universitas Sulawesi Barat, Majene

*Email: andi.yayank@unsulbar.ac.id

ABSTRACT: *The Miring Village community is one of the villages that has a dependency on the forest. Before obtaining permission from HKm, the existence of the forest around the village of Miring was quite critical. Until now, the existence of HKm KTH Buttu Puang is still active and has achievements. So it is important to see how the adaptation pattern of the Miring village community is with the existence of a Social Forest management permit. The understanding of the adaptation of the Miring Village community in the development of HKm can be a reference for the parties in the development of HKm in other villages. This research was carried out from January to June 2021. The method used was the method of interviewing groups of forest producers. The results of the study indicate that the community adopts an adaptation pattern that includes ecological adaptation, economic adaptation and social adaptation. In the adaptation pattern studied, in general, the community is considered capable of adapting to the applied HKm management system.*

Keywords: *Adaptation Pattern, Household, HKm, Social Forestry, Community*

DOI: 10.24259/jhm.v14i2.21391

1. PENDAHULUAN

Pelibatan masyarakat dalam pemanfaatan hutan menjadi sangat penting, penyelenggaraan kehutanan dengan memperhatikan aspirasi dan mengikutsertakan masyarakat telah menjadi gagasan yang mendasar. Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna (Zainuddin dkk, 2014). Beberapa persoalan kehutanan yang terjadi, seperti pembalakan liar, penggundulan hutan, dan hilangnya keanekaragaman hayati tidak jarang masyarakat pedesaan, masyarakat sekitar hutan disematkan sebagai salah satu penyebabnya (Carol, 2011). Meski demikian beberapa program pemerintah terkait akses pengelolaan hutan oleh masyarakat telah dirilis. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan kawasan dan fungsi hutan sampai dengan tahun 2030 ditempuh melalui upaya penyediaan 12,74 juta hektar untuk keperluan pengembangan hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan desa, dan skema-skema lainnya (Renstra, 2020).

Melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan membangun kolaborasi pengelolaan kawasan hutan bersama masyarakat diharapkan sampai dengan tahun 2030 tidak hanya dapat menyelesaikan konflik kawasan hutan di Indonesia, tetapi juga mampu menciptakan kelembagaan pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan (institutional sustainability) pada tataran mikro dan makro (RKTN). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:

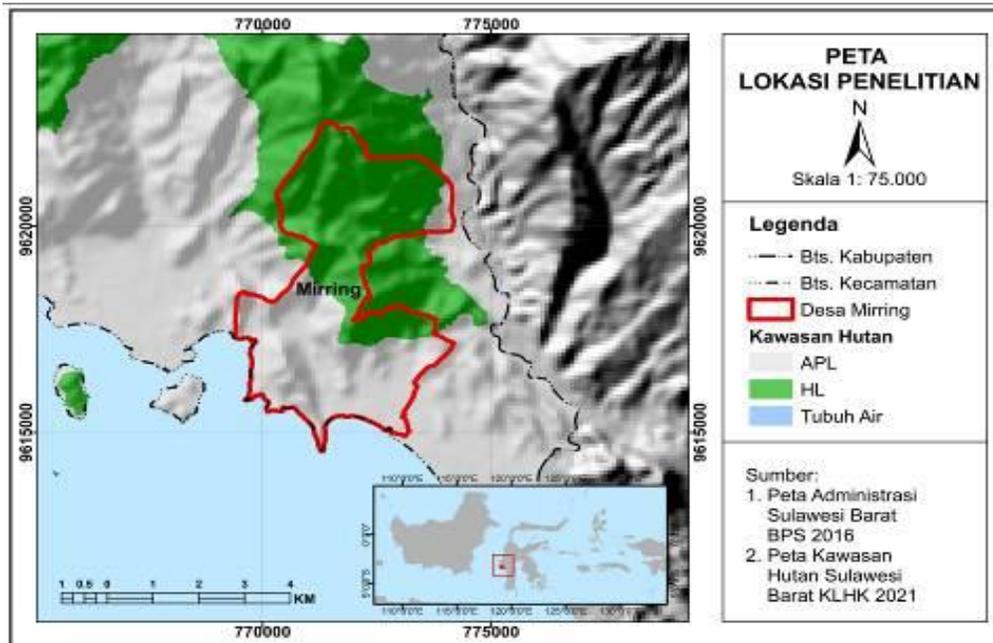
P.83/Menlhk/Setjen/Kum.II/10/2016 tentang perhutanan sosial menjelaskan bahwa hutan kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.

Desa mirring merupakan salah satu desa sekitar kawasan hutan lindung yang masyarakatnya memiliki ketergantungan cukup besar terhadap hutan. Sebelum memperoleh izin HKm keberadaan hutan sekitar Desa Mirring cukup kritis, bahkan untuk pemenuhan air bersih harus mengambil dari desa tetangga. Melalui pembangunan HKm Di Desa Mirring, ditandai pemberian izin no. 7035/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2017 dengan luas areal pengelolaan 1127 Ha. Sampai hari ini keberadaan HKm KTH Buttu Puang masih terus aktif dan berprestasi. Untuk itu penting melihat bagaimana pola adaptasi masyarakat Desa Mirring dengan adanya izin pengelolaan Perhutanan Sosial. Menurut Soekanto (2012) Adaptasi merupakan tindakan atau proses penyesuaian diri terhadap lingkungan dan keadaan sekitar. Tindakan tersebut merupakan tindakan inovatif, upaya mengatasi, mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi, proses belajar dari situasi yang ada, atau menyesuaikan perilaku dengan realitas (Kaharuddin dkk, 2020). Adaptasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah bagaimana masyarakat Desa Mirring menyesuaikan diri secara ekologi, ekonomi dan sosial dengan ada dan hadirnya HKm. Pemahaman terhadap adaptasi masyarakat Desa Mirring dalam mengembangkan HKm dapat menjadi acuan para pihak dalam mengembangkan HKm di desa lain.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian dilakukan dari Bulan Januari – Juni 2021.



Gambar 1. Lokasi Penelitian

2.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui:

- a. Observasi, mengetahui kondisi objektif di lapangan yakni guna mendapatkan gambaran kegiatan kelompok tani dalam mengelola sumberdaya hutan sebelum dan sesudah adanya HKm. Kondisi objektif kelompok tani dilihat dari tiga aspek yaitu aspek ekologi, ekonomi, dan sosial.
- b. Wawancara, memperoleh informasi secara mendalam dari masyarakat di Desa Miring khususnya KTH Buttu Puang yang telah mendapatkan ijin pengelolaan HKm. Wawancara dilakukan terhadap Ketua KTH, Anggota KTH yang terlibat sebagai penanggung jawab kegiatan/program, Tokoh masyarakat, Pemerintah Desa Miring, Pendamping Perhutanan Sosial dan Beberapa Dosen Unsulbar yang selama ini sering melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di HKm Buttu Puang.
- c. Analisis dokumen, bertujuan agar peneliti memiliki informasi tambahan untuk menganalisa keadaan dan perkembangan HKm. Dokumen yang dianalisis berupa perencanaan dan laporan kegiatan HKm.

2.3 Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran informasi masalah secara jelas dan mendalam. Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk aktivitas informan sebagai pola adaptasi untuk bertahan hidup di sekitar kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKm), adaptasi masyarakat yang ingin dilihat pada penelitian ini mencakup tiga aspek yaitu adaptasi ekologi, adaptasi ekonomi, dan adaptasi sosial masyarakat dalam pengelolaan HKm di Desa Miring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Adaptasi tiga aspek diatas akan diselidiki lebih dalam dengan mengetahui situasi dan aktifitas KTH dengan beberapa indikator sebelum dan sesudah hadirnya HKm. Adapun variabel dan indikator untuk melihat adaptasi masyarakat yang ingin dikaji terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Variabel dan indikator adaptasi masyarakat terhadap pengelolaan hutan Kemasyarakatan (HKm)

Variabel	Indikator
Ekologi	Ketersediaan Air
	Tanaman yang dimanfaatkan
	Perlindungan dan Pengamanan Hutan
Ekonomi	Mata Pencaharian
	Sumber Pendapatan Masyarakat
	Pemberdayaan Masyarakat
Sosial	Penyesuaian terhadap nilai, norma, dan kebiasaan dalam mengelola hutan
	Pengetahuan Pengelolaan Kawasan hutan
	Kerjasama dan Jaringan

Analisis data kualitatif yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis data menggunakan metode Miles & Huberman (2007) yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclutions).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Adaptasi Ekologi

HKm di Desa Mirring seluas 1.127 ha. Hak pengelolaannya diberikan kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) Buttu Puang dengan status fungsi kawasan yaitu hutan lindung. Izin Pengelolaan ada sejak tahun 2017 melalui BPSKL (Badan Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan) dengan No. Izin SK.7035/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/17. Pada tahun 1989 sebelum ditetapkannya menjadi kawasan HKm, Hutan di Desa Mirring berstatus hutan negara namun pengelolaannya tidak sebagaimana mestinya. Aktifitas pembukaan lahan dengan metode tebang habis yang dilakukan masyarakat desa Mirring menyebabkan keberadaan hutan hilang sehingga kecenderungannya terjadi longsor pada musim penghujan, kebakaran hutan dan lahan serta kesulitan mendapatkan air (kekeringan) pada musim kemarau. Adapun adaptasi ekologi secara rinci disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. Pola adaptasi ekologi masyarakat dalam pengelolaan HKm di Desa Mirring

Indikator	Sebelum adanya HKm	Setelah adanya HKm
Ketersediaan Air	<ul style="list-style-type: none"> • Air hanya tersedia pada musim penghujan • Masyarakat membeli air dari desa tetangga 	<ul style="list-style-type: none"> • Air tersedia sepanjang tahun • pemanfaatan melalui sistem sylvofisheri
Tanaman yang dimanfaatkan	<ul style="list-style-type: none"> • Pada tahun 1989 Pembukaan hutan besar-besaran perladangan yang berpindah-pindah dilakukan oleh masyarakat disekitar kawasan hutan kemudian ditanami jagung, padi dan kopi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan system Agroforestry melalui Pengkayaan vegetasi hutan melalui penanaman Bitti, Aren dan jenis MPTS. • pemanfaatan HHBK (aren dan lebah madu)
Perlindungan dan Pengamanan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Kebakaran hutan rutin terjadi pada musim kemarau • perburuan satwa • penebangan pohon 	<ul style="list-style-type: none"> • kebakaran hutan tidak terjadi • pemahaman aturan untuk tidak melakukan perburuan satwa • kebutuhan akan kayu dibicarakan dalam rapat/pertemuan disesuaikan dengan aturan berdasarkan IUPHKm • pemberian sanksi bagi anggota yang melanggar

Hasil penelitian menunjukkan setelah adanya HKm dan masuknya pembinaan atau penyuluhan pengelolaan hutan secara lestari. KTH sudah mengetahui hak dan kewajiban dalam pengelolaan hutan. Para petani pengelola HKm menyadari bahwa lahan yang mereka kelola dalam kawasan hutan merupakan kawasan hutan negara yang pemanfaatan utamanya dipercayakan kepada mereka dalam rangka kelestarian hutan dan kesejahteraannya.

Kehadiran HKm di Desa Mirring dengan penerapan sistem Agroforestri nyata mampu memberikan manfaat ekologis. Tutupan lahan hutan meningkat serta ketersediaan air dapat terpenuhi hal ini sejalan dengan penelitian Meine van Noordwijk dkk (2016) yang menemukan bahwa sistem agroforestri campuran menawarkan peluang untuk secara simultan memenuhi kebutuhan air, pangan, energi, dan pendapatan di daerah pedesaan dan pinggiran kota yang padat penduduknya di Indonesia.

3.2. Adaptasi Ekonomi

Bentuk penyesuaian diri atau adaptasi masyarakat Desa Mirring yang tinggal disekitar hutan setelah penetapan program HKm terkait ekonomi yaitu peralihan tata cara pemanfaatan sumberdaya hutan. Sebelum adanya penyuluhan kehutanan dan hadirnya program HKm pendapatan masyarakat hanya bergantung dari pembukaan lahan hutan yang kemudian ditanami jagung, padi dan kopi. Adaptasi ekonomi masyarakat secara rinci disajikan sebagai berikut :

Tabel 3. Pola adaptasi ekonomi masyarakat dalam pengelolaan HKm di Desa Mirring

Indikator	Sebelum adanya HKm	Setelah adanya HKm
Mata Pencaharian	Pertanian hanya pada tanaman jagung, padi dan kebun kopi	<ul style="list-style-type: none"> • Hadirnya pertanian dan industri rumahan gula aren dan lebah madu • Penanaman MPTs (Durian, Rambutan dan langsung disekitar areal HKm
Sumber Masyarakat	Pendapatan Sumber pendapatan hanya dari penjualan komoditi jagung, padi dan kopi	<ul style="list-style-type: none"> • Selain Penjualan hasil pertanian, hasil MPTs pendapatan juga dari penjualan gula aren, gula semut, madu, • Terkhusus pada madu, selain madu hutan (<i>Avis dorsata</i>) juga adanya

		budidaya <i>Trigona</i> sp melalui penggunaan <i>stup</i>
Pemberdayaan Masyarakat	Tidak adanya pemberdayaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan pengolahan gula aren (gula batu dan gula semut) dan lebah madu keluarga petani • Pembuatan demplot • pelatihan-pelatihan dari mitra KTH seperti pengemasan (<i>packaging</i>) gula semut dan madu produk HKm

Sejak ditetapkan sebagai kawasan HKm, masyarakat telah memanfaatkan dan mengolah tanaman pertanian dan kehutanan (agroforestri) yang menerapkan tanaman MPTS (Multi Purpose Tree Species). Tanaman yang dikembangkan oleh masyarakat yaitu kombinasi tanaman kehutanan seperti Bitti dengan tanaman seperti aren, durian, kopi, rambutan, langsung. Penerapan sistem agroforestri dianggap baik, sebagai sebuah sistem yang memadukan berbagai jenis tanaman dalam satu lahan, maka akan memungkinkan naiknya produktifitas petani.

Penelitian Irundu dkk (2018) tentang Nilai ekonomi langsung berbagai sistem pengelolaan hutan rakyat di Desa Mirring, Kab. Polewali, Sulawesi Barat menemukan bahwa nilai ekonomi tertinggi terdapat pada sistem pengelolaan hutan agroforestri sebesar Rp127.962.157. Paparan ini tentunya mendukung bahwa HKm yang ada di Desa Mirring yang menerapkan pola pengelolaan agroforestri memberikan peluang akan adanya peningkatan ekonomi masyarakat terkhusus kepada anggota KTH.

Lahan hutan memiliki berbagai nilai mata pencaharian (Traedala dan Vedeldb, 2018). Adanya skema HKm yang ditunjang dengan pendampingan dan jalinan kerja yang intens memberikan peningkatan pengetahuan mengenai tata cara mendiversifikasi bagian lain tanaman menjadi produk makanan yang bernilai ekonomi. Serta peningkatan kreatifitas olah produk. pengoptimalan pemanfaatan HHBK pada kawasan hutan dan menjadi peluang bisnis untuk masyarakat sekitar hutan.

3.3. Adaptasi Sosial

KTH Buttu Puang, Desa Mirring beranggotakan orang-orang yang berdomisili disekitar areal HKm yang masih memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat satu sama lain, ikatan kekeluargaan antara Masyarakat Desa Mirring menjadikan adaptasi sosial yang ada terjalin dengan baik antar anggota kelompok tani maupun dengan stakeholder dalam melaksanakan pengelolaan HKm. Secara rinci adaptasi sosial masyarakat Desa Mirring sekitar Areal HKm dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. Pola adaptasi sosial Masyarakat dalam pengelolaan HKm di Desa Mirring

Indikator	Sebelum adanya HKm	Setelah adanya HKm
Penyesuaian terhadap nilai, norma, dan kebiasaan dalam mengelola hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya pertimbangan pentingnya keberadaan hutan atas segala fungsinya (fungsi lindung, dan konservasi) • Aturan formal terkait pengelolaan dan pemanfaatan hutan hanya sekedar diketahui, 	<ul style="list-style-type: none"> • pertimbangan fungsi lindung dan konservasi hutan telah menjadi dasar dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan • selain kepatuhan pada aturan-aturan formal pengelolaan dan pemanfaatan hutan juga adanya kesepahaman nilai dan sanksi yang mengikat terhadap setiap anggota KTH HKm
Pengetahuan Pengelolaan Kawasan hutan	Pengelolaan kawasan hutan hanya melihat pada fungsi produksi tanpa pertimbangan keberlanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan dan pemanfaatan didasarkan atas pertimbangan fungsi hutan dan keberlanjutannya • Keterbukaan menerima masukan terkait pemanfaatan dan pengelolaan hutan dari pihak yang berkompeten • pergeseran pemanfaatan hutan dari kayu menjadi pengelolaan HHBK
Kerjasama dan Jaringan	Tidak ada kerjasama dan jaringan yang terbangun	Kerjasama dengan berbagai pihak (BPSKL, Dishut, dan perguruan tinggi)

Terkait aturan pengelolaan hutan hasil penelitian menemukan bahwa sebelum adanya HKm, masyarakat kurang terikat aturan dalam pengelolaan hutan, meskipun mereka menyadari bahwa kebun yang mereka garap berada pada areal kawasan hutan negara. Pola aktifitas pemanfaatan hutan tidak memperhatikan pentingnya keberlanjutan, hal inilah yang menunjang terjadinya longsor pada musim penghujan dan kekeringan dan kebakaran hutan pada musim kemarau. Namun, seiring dengan kehadiran HKm melalui hak dan kewajiban pengelola (KTH) yang diatur dalam IUPHKm menjadikan masyarakat/anggota kelompok kemudian melakukan pengelolaan hutan dengan prinsip keberkelanjutan, untuk itu manajemen kelompok KTH sangat penting diperhatikan. Sejalan dengan Speelman dkk (2014) yang mengatakan kapasitas adaptasi sebagian besar ditingkatkan karena penguatan organisasi.

Selain aturan yang telah ditetapkan dalam IUPHKm hasil penelitian menemukan bahwa aturan tertulis yang mengikat setiap anggota KTH tidak ada, seluruh aturan KTH dibangun atas penyampaian pemahaman nilai melalui musyawarah mufakat dalam setiap pertemuan anggota KTH dengan melibatkan para tetua tokoh adat sebagai saksi atas kesepakatan yang ada.

Aturan tidak tertulis yang ada berlaku dalam kelompok yang selama ini tetap dipegang dan dipahami oleh setiap anggota kelompok antara lain:

1. Anggota kelompok tidak boleh melakukan penebangan kayu tanpa diketahui dan dibicarakan dalam pertemuan kelompok.
2. Dalam hal penebangan kayu yang telah dibicarakan dalam pertemuan kelompok dilakukan melalui metode tebang pilih. kayu yang ditebang merupakan kayu yang dipilih yang didasarkan bahwa tidak akan mengganggu atau merusak hutan dan keberlanjutannya
3. Pelanggaran penebangan kayu oleh anggota KTH yang dapat ditolerir dikenai sanksi dengan mengganti berupa semen lima Sak untuk digunakan dalam penyediaan jalan tani dalam areal HKm (akses jalan di dalam areal HKm)
4. Pelanggaran anggota KTH yang tidak dapat ditolerir akan dikeluarkan dari keanggotaan KTH, dan penyelesaiannya diserahkan kepada pihak yang berwenang.

Adaptasi sosial yang juga terjadi setelah adanya HKm ialah masyarakat telah membentuk jaringan kerja dengan pihak BPSKL yang kemudian telah berhasil menghadirkan beberapa program kegiatan antara lain pengelolaan gula aren, silvo fishery, pelibatan dalam pelatihan-pelatihan yang

terkait pengelolaan perhutanan sosial. Selain program kegiatan tersebut beberapa bantuan berupa fasilitasi peralatan (pembuatan gula semut), pemberian bibit pohon dan MPTs serta promosi HHBK juga telah terlaksana. Selanjutnya jaringan kerja juga telah terbangun dengan prodi Kehutanan Universitas Sulawesi Barat dalam hal penelitian, pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat.

Jalinan kekerabatan yang dekat tentunya memberi peluang menghadirkan modal sosial masyarakat yang kuat pula sehingga adaptasi sosial secara kolektif akan berlangsung dengan lebih mudah. Petani dengan modal sosial tinggi lebih banyak berpartisipasi dalam proses adaptasi (Saptutyingsih dan Diswandi, 2019). Transformasi pemahaman dan nilai yang dipegang akan mudah terjadi dengan model keterbukaan dengan adanya ruang musyawarah mufakat yang dipegang dan dijalankan dalam setiap persoalan yang dihadapi, hal inilah yang menjadikan adaptasi sosial masyarakat Desa Mirring (semua anggota KTH) mampu melakukannya setelah adanya HKm. Kehadiran HKm pada akhirnya membuka kembali terjadinya ruang-ruang pertemuan dan budaya rembuk antar anggota KTH dan masyarakat Desa Mirring dalam setiap langkah dan kegiatan yang akan dilakukan. Kehadiran penyuluhan dan pengabdian beberapa mitra KTH juga mengantar pada pengetahuan dan pemahaman dalam pengelolaan hutan dengan tidak melupakan kesejahteraan masyarakat yang bergantung didalamnya. Sejalan dengan Penelitian Martapani dkk (2021) yang mengemukakan bahwa hadirnya HKm tidak hanya berpengaruh terhadap ekonomi tetapi juga berpengaruh terhadap sosial masyarakat berupa peningkatan pengetahuan, penguatan kembali budaya, perubahan perilaku, dan penyelesaian konflik lahan dalam mengelola hutan.

4. KESIMPULAN

Pola adaptasi dilakukan masyarakat di kawasan HKm Buttu Puang, Desa Mirring. Bentuk adaptasi ekologi yaitu dengan mengurangi intensitas penebangan kayu dan memperkaya tanaman kehutanan (Kayu Bitti). Pola adaptasi ekonomi yang dilakukan memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam dengan pola agroforestri, pemanfaatan HHBK (Aren dan budidaya Lebah Madu) di areal HKm untuk diolah dan dipasarkan. Adaptasi sosial yang dilakukan masyarakat yaitu menyesuaikan kegiatan berdasarkan aturan IUPHKm dan membangun pemahaman bersama terkait aturan tidak tertulis dalam menunjang pemanfaatan dan pengelolaan HKm. Selain itu keterbukaan jaringan kerjasama dalam memperoleh pengetahuan mengenai pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya hutan. Adaptasi masyarakat desa Mirring pada akhirnya menjadi gambaran bagaimana kehadiran

HKm bukan hanya tentang hutan agar tetap ada, tumbuh dan terjaga, namun juga hutan mampu tetap melayani kebutuhan manusia, masyarakat sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Carol, J And Colfer. 2011. *P Marginalized Forest Peoples' Perceptions of the Legitimacy of Governance: An Exploration*. Elsevier. Vol. 39(12). Hal: 2147–2164
- Irundu, D., Arafat, A. dan Rahmania. 2018. *Nilai Ekonomi Langsung Berbagai Sistem Pengelolaan Hutan Rakyat, di Desa Mirring, Kabupaten Poman, Sulawesi Barat*. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*. Vol.10(1):185-191.
- Kaharuddin., Putdyatmoko, S., Fandeli, C dan Martani, W. 2020. *Wujud Adaptasi Masyarakat Kalibiru dalam Pengembangan Ekowisata*. *Jurnal Pariwisata Terapan* Vol. 4(1).
- Martapani, N. A., Fauzi, H., dan Naparin, M. 2021. *Dampak Hutan Kemasyarakatan Terhadap Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat Studi Kasus: Masyarakat Peduli Gambut Sukamaju Kph Kayu Tangi*. *Jurnal Rimba Lestari* Vol.1(1): 35-46
- Meine, V.N., Yeon-Su, K., Beria, L., Kurniatun, H and Larry, A.F. 2016. *Metrics of water security, adaptive capacity and agroforestry in Indonesia*. Elsevier. 21: 1-8.
- Miles, M.B & Huberman, A. 2007. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjeptjep Rohendi Rohisi. Skripsi. Jakarta, Universitas Indonesia.
- _____. 2016. *Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.83MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016. Tentang Perhutanan Sosial*
- _____. 2020. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/Menlhk/Setjen/Set.1/8/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2020-2024*.
- Saptutyingsih, E., Diswandi., dan WanggiJaung. 2019. *Does social capital matter in climate change adaptation? A lesson from agricultural sector in Yogyakarta, Indonesia*. Elsevier
- Speelman, E.N., Groot, J.C.J., Barrios., Kok, K., Keulen., H, and Tiftonell, P. 2014. *From coping to adaptation to economic and institutional change –Trajectories of change in land-use management and social organization in a Biosphere Reserve community, Mexico*. Elsevier. 31-44.
- Soekanto, S. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Trædala, T and Vedeldb, P. 2018. *Cultivating forests: The role of forest land in household livelihood adaptive strategies in the Bac Kan Province of northern Vietnam*. Elsevier. Hal:249-258
- Zaenuddin, D., Hidayat, A., dan Teddy Lesmana. 2014. *Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat*. LIPI.